

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kelurahan, maka dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kecamatan Sipatana bahwa dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan. Dapat dilihat dari aspek perencanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring kebijakan. Namun yang menjadi perhatian yaitu masih kurangnya koordinasi antar lembaga terkait pengupdatean data terbaru terhadap masyarakat yang memang layak untuk menerima bantuan.
2. Faktor-faktor penentu keberhasilan Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kecamatan Sipatana meliputi organisasi, interpretasi, penerapan belum sepenuhnya keterlibatan dari pihak-pihak terkait dengan program bantuan perbaikan RTLH dilaksanakan secara optimal seperti pelaksanaan pembangunan yang belum merata disetiap kelurahan, minimnya koordinasi antara lembaga dengan masyarakat untuk penentu lokasi, program pembangunan yang belum menyentu kepentingan masyarakat umum dan akan memicu timbulnya faktor kecemburuan social diantara kalangan masyarakat.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ada peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan hubungan/koordinasi antar lembaga pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan tim pelaksana kegiatan kepada masyarakat sehingga tiba pada saat pelaksanaan kegiatan tidak terdapat hambatan atau kendala yang akan dihadapi.
2. Lebih meningkatkan peran pemerintah kelurahan sebagai roda pemerintah untuk lebih pendataan kembali atau pengupdetan data terbaru agar program pelaksanaan pembangunan memang benar-benar menyentu kepentingan masyarakat yang memang layak untuk menerima bantuan.
3. Bagi pemerintah kecamatan lebih melakukan pengawasan ke pemerintah keluraha untuk pembangunan rumah layak huni tidak hanya verifikasi agar bisa mengefektifkan kebijakan rumah tidak layak huni.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan Widya Karya
- Febri Muhammad (2020) Implementasi Kebijakan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Padang. Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/26754/25862>
- Handoyono, E.(2012). *Kebijakan Publik*. Semarang : Penerbit berkerjasama antara Jakarta: Prenada Media
- Keban, Yeremias T. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta. Gava Media.
- Muharam, R.S., & Rusli,B. (2019) Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Kabupaten Bandung. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 3(1)
- Parsons, Wayne. (2005). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Penerbit Alfabeta.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik teori dan proses*. Yogyakarta : diterbitkan oleh Medpress
- Abbas, I. (2017). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Paradigma (JP)*, 4(2), 80-91.
- Ismowati, M., & Subhan, A. (2018). Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Pandeglang. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 194-205.

Nastiti, L., Adhi, S., & Herawati, N, R (2016). Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan Tahun 2014. *Journal Of Politic and Government studies*, 5(04), 91-100.

Putra Restu (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kota Pekanbaru.

Putra, A. W., & Syahrani, C. T. P. Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011).

Susanto, A. (2016). Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi berbasis pemberdayaan masyarakat (Studi pada Balai Taman Nasional Gunung Merapi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 112-119.

Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(1), 1-21.

Winarno, B. (2018). Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(1), 66-74.

[https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html#:~:text=Pada%20bulan%20Maret%202018%2C%20jumlah,\(10%2C12%20persen\)](https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html#:~:text=Pada%20bulan%20Maret%202018%2C%20jumlah,(10%2C12%20persen).). Diakses pada tanggal 7 Desember 2020

<https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/view/58>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2021

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/26754/25862>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

UU No 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan Sosial

UU no.13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.